

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Panggil Satpol PP dan BPAD

Terkait Telepon Seluler Ilegal

Balai Kota, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta panggil Satpol PP dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI (BPAD) terkait temuan tower telepon seluler yang berdiri di aset Pemprov DKI, tetapi tidak membayar sewa pada Selasa (19/12).

"Besok (Selasa) kami akan rapat bersama kedua instansi itu," kata Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Senin (18/12).

Syarif sudah menerima informasi bahwa perusahaan provider ternyata bertahun-tahun bisa mengurus izin tower tanpa perlu menandatangani perjanjian sewa dengan BPAD.

"Itu kan aneh. Izin towernya keluar, tetapi yang berdiri di lahan Pemprov DKI tidak ada perjanjian kerja samanya dengan pemerintah," kata Syarif.

Menurut Syarif, itu merupakan kegagalan dalam sistem perizinan di Pemprov DKI Jakarta. Ia memberi perbandingan apabila tower provider berdiri di atas lahan warga saja pasti bakal repot kalau belum ada perjanjian sewa menyewa sebelum izin dikeluarkan.

"Bisa diprotes warga pasti pemprov kalau izin sudah keluar tetapi pemilik tower belum ada perjanjian sewa dengan warga," kata Syarif.



Hal itu sama saja ketika tower provider berdiri di lahan pemprov dan keluar izinya, tetapi belum ada perjanjian sewan dengan Pemprov lewat BPAD. "Itu kan lucu. Itu sama saja dengan tower provider ilegal namanya," kata Syarif.

Apabila hal itu sudah terjadi bertahun-tahun, kata Syarif, berarti sama saja provider dan Pemprov DKI sudah bertahun-tahun pula memproses perizinan ilegal. "Akan kami tanyakan dan minta klarifikasinya besok (Selasa) itu," kata Syarif.

Menurut Syarif, soal tower provider ilegal harus dibersihkan di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Aset Pemprov DKI mesti memberi pemasukan maksimal.

Ditelusuri

Perkara ini berawal dari DPRD DKI yang mendadak

Izin towernya keluar, tetapi yang berdiri di lahan Pemprov DKI tidak ada perjanjian kerja samanya dengan pemerintah.

Syarif
Sekretaris Komisi A
DPRD

menyebut memiliki data acuan ributan tower provider ilegal di Jakarta. Setelah ditelusuri BPAD, ternyata bukannya ilegal. Tower itu memiliki izin tapi tak memiliki perjanjian kerja sama dengan BPAD.

Kepala BPAD DKI, Ahmad Firdaus menyatakan siap memberi keterangan kepada anggota dewan. "Saya siap untuk memberi keterangan," kata Firdaus.

Firdaus mengatakan, untuk urusan izin, provider rata-rata sudah memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD Panggil Satpol PP dan BPAD

Mengumpulkan Data Izin Tower

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP DKI) mengumpulkan ribuan data izin tower provider di Jakarta. Hal itu menyusul langkah Dinas Pengelola Aset Daerah DKI (BPAD) meninjau perjanjian sewa menyewa provider mendirikan tower di atas lahan aset milik Pemprov.

"Kami sedang telusuri datanya dulu, ada ribuan soalnya izin tower provider yang sudah kami keluarkan," kata Kepala DPMPTSP DKI, Edy Junaedi, baru-baru ini.

Menurut Edy, data milik DPMPTSP DKI jadi patokan BPAD DKI meninjau dimana saja lahan aset DKI yang berdiri

tower provider.

"Sebab tower provider ini tak semuanya, ada berdiri di atas lahan aset Pemprov DKI. Ada juga yang berdiri di atas lahan swasta atau milik warga," kata Edy.

Kepala BPAD DKI, Ahmad Firdaus, mengatakan, langkah ini merupakan terobosan pribadinya untuk memberi pemasukan ke Pemprov DKI. Selama ini urusan aset cenderung tidak dipedulikan oleh Pemprov DKI padahal nilainya tinggi.

"Sebagian besar tower provider di lahan pemprov itu tak ada perjanjian kerjasamanya. Hanya ada izinya saja," kata Firdaus.

Padahal sudah sewajibnya ketika

provider menggunakan lahan aset DKI untuk mendirikan tower, maka mesti membayar sewa.

Sedangkan Satpol PP DKI Jakarta menunggu perintah dari dua instansi di Pemprov DKI untuk menyegel tower provider yang tak memiliki perjanjian sewa menyewa. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu, mengatakan, memilih menunggu karena terkait penzinan ada di kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan data perjanjian sewa menyewa berada di BPAD.

"Jadi Satpol PP menunggu rekomendasi dari arahan kedua dinas itu untuk melakukan pengawasan bahkan penyegelan," kata Yani. (ote)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

"Tapi provider yang tower-nya berdiri di lahan Pemprov DKI ternyata banyak yang belum memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPAD Pemprov DKI," kata Firdaus.

Langkah

Hal itu, kata Firdaus, terjadi sejak lama dan baru kali ini akan didata ulang. Ia mengaku sudah melakukan dua

langkah terkait inventarisir lahan Pemprov DKI yang dipakai tower provider.

Langkah pertama, kata Firdaus, berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait data perizinan tower provider di Jakarta. Dari data itu BPAD akan menginventarisir lokasi lokasi aset Pemprov yang berdiri tower provider. "Dari situ lah bisa kami minta agar provider-nya membuat perjanjian kerja sama," katanya.

Langkah kedua, kata Firdaus, yakni mengumpulkan delapan provider untuk meneliti lokasi tower-nya yang berdiri di lahan Pemprov. "Kalau yang delapan provider itu sudah langsung bersedia untuk membuat perjanjian kerja sama," kata Firdaus.

Firdaus mengatakan, terkait penghitungan biaya sewa menyewa nantinya akan dikerjakan kantor jasa penilai publik (KJPP). "Perjanjian kerja

sama ini harus dibuat karena merupakan pemasukan bagi Pemprov," kata Firdaus.

Saat ini nilai aset milik Pemprov DKI tercatat sebesar Rp 400 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2017 (LHP BPK 2017). Dari angka sebesar itu, pada tahun 2017 pemasukan dari aset baru Rp 350 miliar. "Masih bisa lebih dari itu seharusnya," kata Firdaus. (ote)